

BAB VI

SARAN

1. Gudang Obat Gresik

- Berdasarkan hasil kunjungan diketahui gudang obat masih perlu memperhatikan batas maksimum penumpukan dan memberi jarak dengan dinding sehingga mudah dibersihkan dan tidak lembab.
- Perlu diperhatikan juga penataan FIFO atau FEFO yang digunakan karena terlihat banyak barang yang menumpuk sehingga susah pengontrolan dalam pengambilan.
- Dalam peninjauan stok barang, sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi dan manual agar memudahkan dalam pengontrolan obat yang masuk dan keluar sehingga diharapkan stok yang ada sesuai dengan jumlah fisik yang ada.

2. Puskesmas Aloon Aloon Gresik

- Dalam peningkatan pelayanan kefarmasian, sebaiknya dilakukan penambahan tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (AA, S1 farmasi dan D3 farmasi).
- Dalam upaya pelayanan kefarmasian, sebaiknya Puskesmas menyediakan tempat untuk penyerahan obat dan KIE yang nyaman agar dalam menerima informasi pasien dapat mengetahui dan memahami dengan jelas.
- Dalam ruangan sebaiknya ruang peracikan dengan tempat menerima resep dipisahkan atau diberikan sekat. Pada ruang peracikan sebaiknya juga tersedia wastafel untuk mencuci atau membilas alat peracikan yang bekas pakai.

- Dalam kamar obat terutama didekat tempat peracikan sesuai aturan yang ada seharusnya dilengkapi dengan wastafel untuk mempermudah proses pelayanan resep terutama dalam hal sanitasi dan hygiene.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2005. *Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. [tahun 2008]. Pedoman Penilaian Tenaga Kerja Teladan di Puskesmas Tahun 2008. (Online). http://www.depkes.go.id/downloads/pedoman_penilaian.pdf, [2012, Juli 14].
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, 2006, *Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2006 *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan. [no date]. Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Online). <http://www.pu.go.id/sekjen/ biro%20hukum/ keppres/ keppres80-03.htm>. [10 Juli 2008].
- Dinas Kesehatan. [no date]. Permenkes RI No. 168/Menkes/Per/II/2005 Tentang Prekursor Farmasi. Jakarta.
- Ismail, N., 2002. **Keracunan Makanan**. Utusan *publications*, Malaysia.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/Sk/Ix/2004
- Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. (Online). <http://www.desentralisasi.kesehatan.net/id/moduldhs/bahanbacaanumum/Bab%204%20Desentralisasi%20dan%20Perkembangan%20Peraturan%20Perundangan%20di%20sektor%20kesehatan.pdf>. [10 Juli 2008].

Pengurus Daerah IAI Jawa Timur, 2010. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*, Surabaya.

Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI [tahun 2005]. Gambaran Penyalenggara NAPZA Tahun 2001-2004. (Online). <http://bankdata.depkes.go.id/data%20intranet/NAPZA/Kajian%20Napza%202001-2004.pdf>. [14 Juli 2008].

Raharjo, R., 2004. **Kumpulan Kuliah Farmakologi**. Edisi 2, penerbit :Kedokteran ECG, Jakarta.

Sumardjo, D., 2006. **Pengantar Kimia** :Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata 1 Fakultas Bioeksakta, Jakarta